

Judul : Anggaran Kemensos Disunat Rp 800 M
Tanggal : Rabu, 19 Oktober 2016
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 2

Anggaran Kemensos Disunat Rp 800 M

JAKARTA-Berdasarkan surat keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI besaran anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) untuk 2017 disepati sebesar Rp 17,5 triliun. Padahal sebelumnya dalam pagu RAPBN, Kemensos mengajukan angka Rp 18,3 triliun. Ini artinya ada pemotongan anggaran sebesar Rp 800 miliar.

Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, dampak dari pemotongan itu ada sejumlah pengurangan anggaran pada direktorat di Kemensos. Pada Sekretaris Jenderal' pengurangan hingga 6,6 persen

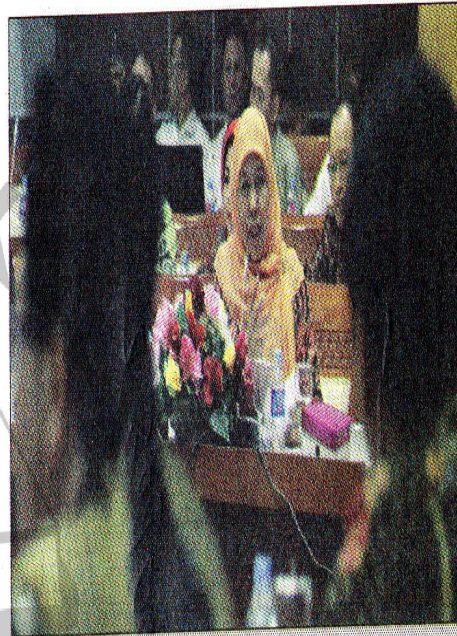
atau senilai Rp 270 miliar. Direktorat Jenderal dikurangi sekitar 0,64 persen atau setara Rp 30 miliar, Direktorat Dayasos pengurangan 11,20 persen atau setara Rp 1,9 triliun.

Kemudian, Direktorat Rehabilitasi Sosial pengurangan hingga 11,9 atau setara Rp 930 miliar, Direktorat Fakir Miskin pengurangan hingga 6,6 persen atau setara dengan Rp 560 miliar dan Bagian Pendidikan dan Pelatihan pengurangan hingga 6,3 persen atau setara dengan Rp 330 miliar. "Untuk Direktorat Lijamsos ada peningkatan, karena ada perluasan cakupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH sebanyak 6

juta," ujar Khofifah usai rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa (18/10).

Lebih jauh Khofifah mengungkapkan, sesuai mandat pada UU Perlindungan Anak atau Perpu Kebiri Kemensos melakukan rehabilitasi baik kepada korban dan pelaku. Untuk itu, dibutuhkan tenaga konselor dana pekerja sosial (peksos) yang tersertifikasi. Untuk pelaku, menurut Khofifah, tersebar di Lapas dewasa dan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA). "Karena keputusan Banggar, pemenuhan konselor dan peksos tidak ter-support," jelasnya.

Selain itu, pada Program Keluarga Harapan (PKH), dikatakan



CHARLIE LOPULUA/INDOPOS

MENJELASKAN: Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (18/10).

Khofifah, pada 2017 nanti akan dicairkan satu kali. Sementara pada tahun sebelumnya, 2016 proses pencairannya sebanyak empat kali. "Pengurangan anggaran menyebabkan intervensi pengeluaran KPM oleh pemerin-

tah yang idealnya berkisar 16-19 persen menjadi 9,7 persen, ini jadi tidak nendang. Ini membutuhkan kerja sama lintas K/L (kementerian/lembaga) dengan program pemberdayaan sosial sasar KPM," ungkapnya. (nas)